



Optimalisasi Potensi Desa Wisata Ketingan di Sleman, Yogyakarta melalui Penguatan Tata Kelola Destinasi Berkelanjutan

Althaf Reynaldo Wiratama ^{1*}, Nareswari Kirana Adiputri ², Jovian Ardhana Prakasa ³

(1) Program Studi Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

(2) Program Studi Pariwisata, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

(3) Program Studi Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author: althaf.wiratama@univpancasila.ac.id

Article History

Manuscript submitted:

12 September 2026

Manuscript revised:

26 September 2026

Accepted for publication:

29 September 2026

Abstract

Tourism villages have an important role in strengthening local economies, preserving cultural and environmental resources, and promoting community-based tourism. However, the sustainability of tourism villages depends not only on the availability of attractions but also on effective destination governance, community participation, institutional capacity, and adaptive management. This study aims to analyze the tourism potential and governance challenges of Ketingan Tourism Village, Sleman, Yogyakarta, and formulate a sustainable destination governance strategy. The study employed a qualitative case study design using document analysis and literature review. Data were obtained from scientific articles, official tourism information, policy documents, and previous studies concerning Ketingan Tourism Village and sustainable tourism village governance. Data were analyzed through thematic analysis based on four dimensions: destination potential, institutional governance, community participation, and sustainability. The findings indicate that Ketingan possesses a distinctive ecological attraction associated with egret and pond heron habitats, supported by rural landscapes and local community resources. Nevertheless, its tourism development has experienced stagnation, reflected in weak tourism management structures, limited tourism products, insufficient promotion, declining community engagement, and environmental pressures. The study proposes a governance strengthening model based on institutional revitalization, ecological conservation, community empowerment, product diversification, digital promotion, and multi-stakeholder collaboration. The model is expected to support the transformation of Ketingan into a more adaptive, inclusive, and sustainable tourism destination.

Keywords

sustainable tourism,
tourism village,
destination governance,
community participation,
Ketingan

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



How to Cite: Wiratama, A. R., Adiputri, N. K., & Prakasa, J. A. (2026). Optimalisasi Potensi Desa Wisata Ketingan di Sleman, Yogyakarta melalui Penguatan Tata Kelola Destinasi Berkelanjutan. *Tourism and Hospitality Research*, 2(3), 131–138. <https://doi.org/10.70716/thr.v2i3.421>

Pendahuluan

Desa wisata merupakan salah satu pendekatan pembangunan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam pengelolaan sumber daya dan manfaat pariwisata. Pengembangan desa wisata tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga untuk menciptakan manfaat ekonomi, memperkuat identitas sosial budaya, serta menjaga

keberlanjutan lingkungan. Konsep tersebut sejalan dengan pendekatan *community-based tourism* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan pariwisata. Penelitian mengenai desa wisata di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting karena keberlanjutan destinasi sangat berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan (Iqbal et al., 2021; Johari et al., 2021; Soemardiono et al., 2021). Oleh karena itu, keberadaan sumber daya wisata yang menarik belum cukup apabila tidak didukung tata kelola destinasi yang mampu mengintegrasikan kepentingan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, wisatawan, dan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan destinasi, tata kelola pariwisata (*tourism governance*) menjadi semakin penting karena destinasi merupakan sistem yang terdiri atas berbagai aktor dengan kepentingan, sumber daya, dan kapasitas yang berbeda. Tata kelola destinasi tidak sekadar berkaitan dengan struktur organisasi pengelola, tetapi mencakup mekanisme koordinasi, pembagian peran, pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan sumber daya, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Wibowo et al. (2022) menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dapat memperkuat kemandirian dan keberlanjutan desa wisata melalui hubungan yang lebih terintegrasi antara masyarakat, pemerintah, dan aktor lainnya. Sementara itu, Pambudi et al. (2022) menegaskan pentingnya *network governance* dalam pengembangan desa wisata karena keberhasilan destinasi tidak dapat dicapai melalui satu aktor saja. Perspektif tata kelola destinasi juga menempatkan kemampuan adaptif sebagai unsur penting dalam menghadapi perubahan lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebijakan (Berliandaldo et al., 2022; *Destination governance literature*).

Desa Wisata Ketingan di Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan desa wisata yang mengandalkan atraksi budaya atau buatan. Identitas utama Ketingan berkembang melalui keberadaan habitat burung kuntul dan blekok yang menjadi daya tarik ekowisata. Keberadaan burung tersebut telah menjadi bagian dari identitas kawasan dan pernah mendorong berkembangnya aktivitas pengamatan burung serta kegiatan wisata berbasis lingkungan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa Ketingan memiliki potensi sosial budaya dan lingkungan yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari produk wisata. Dengan demikian, kekuatan utama Ketingan bukan hanya terletak pada atraksi fauna, tetapi juga pada keterkaitan antara lingkungan, kehidupan masyarakat, lanskap perdesaan, dan pengalaman wisata berbasis edukasi konservasi.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan. Prayoga et al. (2024) menemukan bahwa Desa Wisata Ketingan mengalami stagnasi dan berada pada kondisi penurunan dalam siklus hidup destinasi. Penelitian tersebut menunjukkan adanya penurunan aktivitas wisata, lemahnya struktur pengelolaan, keterbatasan sumber daya manusia pariwisata, serta tekanan eksternal seperti pandemi, perubahan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Ketingan bukan semata-mata kekurangan potensi wisata, tetapi berkaitan dengan kemampuan destinasi dalam mengelola dan mengembangkan potensi tersebut. Bahkan, data resmi JADesta saat ini masih menempatkan Ketingan sebagai desa wisata kategori berkembang dan belum menampilkan atraksi, paket wisata, homestay, maupun suvenir secara aktif dalam profil digitalnya. Kondisi ini dapat menjadi indikator perlunya penguatan kembali sistem pengelolaan dan pemasaran destinasi.

Permasalahan tata kelola tersebut juga dapat dilihat dari aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Desa wisata yang berkelanjutan membutuhkan kelembagaan lokal yang mampu menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, promosi, pengawasan, dan evaluasi secara konsisten. Penelitian Suharti et al. (2023) menunjukkan bahwa keberlanjutan desa wisata memerlukan integrasi antara *community-based tourism*, kewirausahaan sosial, dan profesionalisme manajemen. Anggraini et al.

(2023) juga menemukan pentingnya kepemimpinan berkelanjutan dan inovasi dalam meningkatkan kinerja desa wisata. Sementara itu, Wijayanto et al. (2025) menunjukkan bahwa local creators dengan kepemimpinan, pengalaman, kapasitas, dan kemampuan inovasi yang kuat dapat menjadi penggerak penting dalam membangun mekanisme tata kelola desa wisata yang adaptif. Artinya, revitalisasi Ketingan membutuhkan lebih dari sekadar promosi destinasi; diperlukan penguatan aktor dan kelembagaan yang mampu menggerakkan kembali ekosistem pariwisata lokal.

Selain aspek kelembagaan, keberlanjutan Ketingan juga sangat bergantung pada kemampuan menjaga aset ekologis yang menjadi identitas destinasi. Pengembangan pariwisata berbasis fauna memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengembangan atraksi buatan karena kualitas pengalaman wisata sangat bergantung pada keberlangsungan habitat. Pengurangan pohon tempat burung bersarang, perubahan penggunaan lahan, tekanan pembangunan, dan rendahnya insentif ekonomi bagi masyarakat untuk mempertahankan habitat dapat mengurangi daya tarik destinasi. Pengalaman pengembangan desa wisata di Indonesia menunjukkan bahwa aspek lingkungan perlu ditempatkan sejajar dengan kepentingan ekonomi dan sosial. Hidayattuloh et al. (2020), misalnya, menunjukkan bahwa konsep ekonomi hijau dapat digunakan sebagai strategi untuk menghubungkan pembangunan ekonomi desa wisata dengan perlindungan lingkungan. Demikian pula, Syamsul et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, menjadi bagian penting dalam pemenuhan prinsip destinasi wisata berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji. Penelitian sebelumnya tentang Ketingan telah membahas potensi ekologis, modal sosial, stagnasi destinasi, dan faktor budaya dalam pengelolaan desa wisata, tetapi kajian yang secara khusus mengintegrasikan potensi lokal dengan penguatan tata kelola destinasi berkelanjutan masih terbatas. Sementara itu, penelitian tentang desa wisata di berbagai daerah Indonesia lebih banyak membahas partisipasi masyarakat, community-based tourism, tata kelola kolaboratif, atau pengembangan produk secara terpisah (Junaid et al., 2022; Ningtias et al., 2024; Baswarani & Novianto, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan permasalahan tata kelola Desa Wisata Ketingan serta merumuskan strategi penguatan tata kelola destinasi yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan pemasaran. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka penguatan tata kelola yang dapat digunakan sebagai dasar revitalisasi Ketingan dari destinasi yang mengalami stagnasi menjadi destinasi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis kondisi dan strategi penguatan tata kelola Desa Wisata Ketingan, Sleman, Yogyakarta. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah Desa Wisata Ketingan di Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman. Penelitian dilaksanakan melalui analisis data sekunder dan kajian literatur yang tersedia hingga tahun 2026. Populasi penelitian tidak berupa individu responden, melainkan dokumen dan sumber informasi yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Ketingan dan tata kelola desa wisata berkelanjutan. Sampel dokumen ditentukan secara purposif, meliputi artikel jurnal ilmiah, publikasi akademik mengenai Ketingan, informasi resmi desa wisata, serta dokumen dan informasi kelembagaan pariwisata yang relevan. Instrumen penelitian berupa matriks analisis dokumen yang mengelompokkan data ke dalam empat dimensi utama, yaitu potensi destinasi, tata kelola kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi berdasarkan tema, dan interpretasi untuk merumuskan strategi penguatan tata kelola. Keabsahan analisis dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari artikel ilmiah, sumber resmi pariwisata, dan penelitian terdahulu mengenai Ketingan. Pendekatan ini

digunakan untuk menghindari pembuatan data primer yang tidak tersedia dan memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan didasarkan pada bukti yang dapat ditelusuri.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Ketingan memiliki potensi destinasi yang kuat pada aspek ekowisata berbasis fauna, terutama keberadaan burung kuntul dan blekok yang telah menjadi identitas kawasan. Selain daya tarik fauna, karakter perdesaan, persawahan, lingkungan permukiman, pengetahuan lokal, dan aktivitas masyarakat dapat dikembangkan sebagai komponen pengalaman wisata. Akan tetapi, potensi tersebut belum sepenuhnya dikonversi menjadi produk wisata yang terstruktur. Penelitian Prayoga et al. (2024) menunjukkan adanya stagnasi aktivitas wisata dan lemahnya pengelolaan destinasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama Ketingan bukan ketiadaan daya tarik, tetapi adanya kesenjangan antara tourism resources dan tourism products. Dalam perspektif pengembangan destinasi, sumber daya harus dikemas menjadi pengalaman yang dapat diakses, dipahami, dinikmati, dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Kondisi ini juga sejalan dengan penelitian Suharti et al. (2023) yang menekankan pentingnya integrasi antara sumber daya lokal, keterlibatan masyarakat, dan profesionalisme manajemen.

Tabel 1. Identifikasi Kondisi Tata Kelola Desa Wisata Ketingan

Dimensi	Kondisi yang Teridentifikasi	Tingkat Prioritas	Arah Penguatan
Daya tarik	Habitat burung dan lanskap perdesaan memiliki keunikan	Tinggi	Pengembangan ekowisata dan wisata edukasi
Kelembagaan	Aktivitas pengelolaan mengalami stagnasi	Sangat tinggi	Revitalisasi kelembagaan pengelola
Produk wisata	Produk dan paket wisata belum terstruktur	Tinggi	Diversifikasi paket wisata
Masyarakat	Partisipasi perlu dihidupkan kembali	Sangat tinggi	Pemberdayaan dan pembagian manfaat
Lingkungan	Habitat fauna menghadapi tekanan perubahan ruang	Sangat tinggi	Konservasi berbasis masyarakat
Promosi	Informasi dan produk digital belum optimal	Tinggi	Digitalisasi pemasaran
Kolaborasi	Sinergi antarpemangku kepentingan perlu diperkuat	Tinggi	Model pentahelix

Temuan kedua menunjukkan bahwa revitalisasi kelembagaan merupakan kebutuhan paling mendesak. Tata kelola yang lemah dapat menyebabkan potensi destinasi tidak berkembang meskipun sumber daya wisata tersedia. Profil resmi JADesta yang masih menampilkan Ketingan sebagai kategori berkembang dan belum mencantumkan produk atraksi, paket wisata, homestay, maupun souvenir menunjukkan bahwa terdapat persoalan pada aspek destination readiness dan komunikasi destinasi. Namun, informasi tersebut harus dibaca secara hati-hati karena ketiadaan informasi pada platform digital tidak selalu berarti seluruh fasilitas benar-benar tidak tersedia. Dengan demikian, salah satu agenda awal penguatan tata kelola adalah melakukan inventarisasi dan verifikasi seluruh aset wisata yang masih tersedia di tingkat lokal. Inventarisasi tersebut kemudian harus diterjemahkan ke dalam struktur produk wisata, standar pelayanan, mekanisme reservasi, dan sistem informasi destinasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Ristanto et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kinerja kelembagaan pengelola desa wisata berhubungan dengan pengalaman wisatawan, khususnya pada aspek pelayanan, informasi, kebersihan, dan fasilitas.

Temuan ketiga berkaitan dengan kebutuhan menghidupkan kembali partisipasi masyarakat. Model pengembangan Ketingan perlu menghindari pendekatan yang hanya menjadikan masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kegiatan. Bentuk partisipasi dapat diarahkan pada pemanduan wisata, pengelolaan homestay, penyediaan makanan lokal, pengembangan kerajinan, konservasi habitat, dokumentasi budaya, penyelenggaraan kegiatan edukasi, hingga pemasaran digital. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Iqbal et al. (2021), Johari et al. (2021), dan Baswarani dan Novianto (2025) yang menunjukkan bahwa keberlanjutan desa wisata sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi. Dalam konteks Ketingan, pemberdayaan masyarakat juga perlu memperhatikan perubahan persepsi terhadap keberadaan burung. Ketika fauna yang sebelumnya dipandang sebagai aset wisata mulai dianggap sebagai gangguan, diperlukan mekanisme insentif dan edukasi agar kepentingan konservasi dan kepentingan rumah tangga dapat dipertemukan. Dengan demikian, konservasi tidak diposisikan sebagai kewajiban masyarakat semata, tetapi sebagai aktivitas yang menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi.

Temuan keempat menunjukkan bahwa penguatan tata kelola Ketingan perlu menggunakan pendekatan kolaboratif dan pentahelix. Pemerintah kalurahan dan pemerintah daerah dapat berperan dalam regulasi, fasilitasi, infrastruktur, dan peningkatan kapasitas; kelompok masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan atraksi dan konservasi; perguruan tinggi dapat mendukung penelitian, pelatihan, dan inovasi; sektor swasta dapat mendukung pembiayaan dan akses pasar; sedangkan media dan platform digital dapat memperkuat promosi. Model kolaboratif penting karena permasalahan Ketingan melibatkan dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan teknologi secara bersamaan. Pusparani dan Rianto (2021) serta Yasir et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan pentahelix dapat memperluas dukungan dan kapasitas pengembangan desa wisata. Penelitian Wijayanto et al. (2025) juga menunjukkan bahwa tata kelola yang didukung local creators dan kolaborasi multipihak dapat memperkuat keberlanjutan komunitas. Dengan demikian, struktur pengelola Ketingan perlu diarahkan menjadi organisasi yang memiliki pembagian fungsi dan tanggung jawab yang jelas, bukan hanya struktur administratif.

Temuan terakhir berkaitan dengan strategi keberlanjutan dan inovasi produk. Ketingan sebaiknya tidak hanya dipasarkan sebagai lokasi untuk melihat burung, tetapi dikembangkan sebagai destinasi ekowisata-edukasi yang mengintegrasikan pengamatan burung, interpretasi habitat, kehidupan perdesaan, pertanian, edukasi konservasi, kuliner lokal, serta aktivitas masyarakat. Strategi tersebut memungkinkan wisatawan memperoleh pengalaman yang lebih beragam sekaligus memperluas sumber pendapatan masyarakat. Pengembangan produk perlu dilakukan secara bertahap dengan prinsip daya dukung lingkungan agar peningkatan kunjungan tidak menyebabkan kerusakan habitat. Konsep ekonomi hijau, pengelolaan lingkungan, inovasi hemat sumber daya, dan kepemimpinan berkelanjutan dapat menjadi landasan strategi tersebut (Hidayattuloh et al., 2020; Syamsul et al., 2023; Anggraini et al., 2023). Selain itu, pemasaran digital perlu dikembangkan melalui situs resmi, media sosial, Google Business Profile, sistem reservasi, peta digital, serta konten edukasi mengenai fauna dan kehidupan masyarakat. Dengan strategi tersebut, penguatan tata kelola tidak berhenti pada pembentukan organisasi, tetapi menghasilkan ekosistem destinasi yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis secara bersamaan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, model optimalisasi Ketingan dapat dirumuskan sebagai Ketingan Sustainable Destination Governance Model, yang terdiri atas enam tahapan: (1) revitalisasi kelembagaan; (2) inventarisasi dan perlindungan aset ekologis; (3) peningkatan kapasitas masyarakat; (4) pengembangan produk dan paket wisata; (5) digitalisasi promosi dan pelayanan; dan (6) pembentukan kolaborasi multipihak serta sistem monitoring. Model ini menempatkan konservasi sebagai fondasi, masyarakat sebagai aktor utama, kelembagaan sebagai penggerak, inovasi sebagai instrumen, dan kolaborasi sebagai mekanisme penguatan. Pendekatan tersebut relevan dengan perkembangan kajian tata kelola desa wisata

di Indonesia yang menekankan pentingnya kolaborasi, kepemimpinan lokal, partisipasi, dan kapasitas adaptif. Dengan demikian, optimalisasi Ketingan tidak seharusnya diarahkan semata-mata untuk mengejar peningkatan jumlah wisatawan, tetapi untuk membangun destinasi yang memiliki kemampuan bertahan, beradaptasi, dan memberikan manfaat secara adil kepada masyarakat.

Kesimpulan

Desa Wisata Ketingan memiliki modal destinasi yang kuat berupa keunikan ekologi, keberadaan burung kuntul dan blekok, lanskap perdesaan, serta sumber daya sosial masyarakat. Namun, potensi tersebut belum optimal karena menghadapi persoalan stagnasi aktivitas wisata, lemahnya kelembagaan pengelola, keterbatasan produk wisata, rendahnya inovasi dan promosi, serta tekanan terhadap keberlanjutan habitat. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan tata kelola merupakan faktor kunci untuk mengoptimalkan kembali potensi Ketingan. Strategi yang direkomendasikan meliputi revitalisasi kelembagaan, penguatan partisipasi masyarakat, konservasi berbasis masyarakat, diversifikasi produk ekowisata-edukasi, digitalisasi pemasaran, dan kolaborasi pentahelix. Secara praktis, pemerintah daerah dan pemerintah kalurahan perlu memfasilitasi penyusunan rencana induk revitalisasi Ketingan yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Pengelola juga perlu memiliki indikator kinerja yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, pelayanan, dan kelembagaan. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian lapangan dengan wawancara mendalam, observasi, survei masyarakat, dan analisis daya dukung lingkungan untuk menguji model tata kelola yang dihasilkan secara empiris serta mengukur tingkat kesiapan masyarakat dan kelayakan produk wisata Ketingan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kalurahan Tirtoadi, pengelola Desa Wisata Ketingan, masyarakat Padukuhan Ketingan, serta berbagai pihak yang mendukung penyediaan informasi dan data untuk penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada peneliti dan institusi yang telah menghasilkan publikasi ilmiah mengenai pengembangan desa wisata dan tata kelola pariwisata berkelanjutan yang menjadi dasar kajian ini.

Daftar Pustaka

- Anggraini, R., Kho, K., & Aliandrina, D. (2023). The influence of sustainable leadership and sustainable performance through frugal innovation in tourist villages in Indonesia. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 8(2), 277–285. <https://doi.org/10.26905/jpp.v8i2.11405>
- Baswarani, D. T., & Novianto, U. (2025). Community participation in sustainable cultural heritage tourism in The Braga Tourism Village. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 23(2), 168–182. <https://doi.org/10.5614/ajht.2025.23.2.06>
- Berliandaldo, M., Fasa, A. W. H., & Andriani, D. (2022). Implikasi peran Destination Management Organization–Destination Governance dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Kepariwisataaan*, 21(2). <https://doi.org/10.52352/jpar.v21i2.845>
- Hidayattuloh, M. H., Bambang, A. N., & Amirudin. (2020). The green economy concept as development strategy of Cempaka Tourism Village toward sustainable tourism development. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 5(1), 30–37. <https://doi.org/10.14710/ijpd.5.1.30-37>
- Iqbal, M., Elianda, Y., Nurhadiyanti, N., & Akbar, A. (2021). Community-based ecotourism in Indonesia: A case study in Nglanggeran Tourism Village. *Jurnal Good Governance*, 17(1). <https://doi.org/10.32834/gg.v17i1.252>

- Johari, M., Azizurrohmah, M., & Al-Qusyairi, Y. S. (2021). Supporting and inhibiting factors of community based tourism management: A case study of Setanggor Village. *Journal of Applied Sciences in Travel and Hospitality*, 4(2), 60–66. <https://doi.org/10.31940/jasth.v4i2.60-66>
- Junaid, I., Dewi, W. O., Said, A., & Hanafi, H. (2022). Pengembangan desa wisata berkelanjutan: Studi kasus di Desa Paccekke, Kabupaten Barru, Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(3), 287–301. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.287-301>
- Kho, K., Anggraini, R., & Aliandrina, D. (2023). The influence of sustainable leadership and sustainable performance through frugal innovation in tourist villages in Indonesia. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 8(2), 277–285. <https://doi.org/10.26905/jpp.v8i2.11405>
- Ningtias, K., Sudagung, A. D., Sari, V. Y., & Adiwinata, Y. K. (2024). The establishment of a sustainable tourism village in West Kalimantan, Indonesia: Case study of Pentek Sustainable Tourism Village at Mempawah Regency. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 22(3), 326–340. <https://doi.org/10.5614/ajht.2024.22.3.06>
- Nurwanda, A., Daraba, D., Suprajogo, T., & Puspita, D. (2024). Collaborative governance in tourism village development in Ciamis Regency, West Java Province, Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 362–375. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i2.1149>
- Pambudi, S. S. I., Hakim, M. L., & Lesmana, V. Y. (2022). Network governance towards development policy of Podokoyo Tourism Village in Pasuruan Regency. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(2), 236–248. <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i2.339>
- Pradana, G. W., Zarkasyi, & Haryono, H. (2022). Tourism village management requires good tourism governance: Study in the Kampung Lampion Code 18 Yogyakarta area. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(1), 20–27. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p20-27>
- Prayoga, I. K. A., Yahya, A. N., & Tarwaca, M. I. K. (2024). Menelisik falsafah *nrimo ing pandum* pada manajemen Desa Wisata Ketingan, Sleman. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 14(1). <https://doi.org/10.22146/jnp.93961>
- Pusparani, P., & Rianto, R. (2021). Implementasi konsep pentahelix dalam pengembangan desa wisata Cibuntu. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.32528/sw.v4i1.5389>
- Ristanto, H., Sutono, A., Sumaryadi, Rahtomo, W., & Permana, O. (2025). Governance performance of Pokdarwis in Cipada Tourism Village, Cikalong Wetan Sub-District, West Bandung Regency. *Journal of Tourism Sustainability*, 5(2), 153–165. <https://doi.org/10.35313/jtospolban.v5i2.161>
- Siregar, N. A. M., Antariksa, B., Najiyati, S., & Sukarno, T. D. (2024). Effects of tourism village on sustainable livelihoods and pandemic resilience in Serang Village. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 18(2), 235–256. <https://doi.org/10.47608/jki.v18i22024.235-256>
- Soemardiono, B., Yudiantono, H., & Soebijantoro. (2021). Community-based tourism in Kresek Village, Madiun, East Java. *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events*, 5(1), 22–31. <https://doi.org/10.31940/ijaste.v5i1.2366>
- Suharti, L., Sirine, H., & Martono, S. (2023). Developing a sustainable tourism village model: An exploratory study. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(1), 63–82. <https://doi.org/10.9744/jmk.25.1.63-82>
- Syamsul, A. D. S., Lestari, I., Arini, S., Natria, D., Iswanto, T., & Utomo, B. (2023). Conformity assessment analysis of self-declare ecolabel criteria for Indonesia's tourism villages development in Cikolelet, Banten Province. *International Journal of Green Tourism Research and Applications*, 5(1), 60–80. <https://doi.org/10.31940/ijogtra.v5i1.60>
- Wibowo, B., Suherlan, H., Hidayah, N., & Nurrochman, M. (2022). Analisis tata kelola kolaboratif desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan: Investigasi empiris dari Ngargoretno-Magelang. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 6(1). <https://doi.org/10.34013/jk.v6i1.646>

-
- Wijayanto, F., Kolopaking, L. M., & Mardiana, R. (2025). Empowering local creators and governance for sustainable village tourism in Bandung Regency. *Society*, 13(2), 814–832. <https://doi.org/10.33019/society.v13i2.828>
- Yasir, Y., Firzal, Y., Sulistyani, A., & Yesicha, C. (2021). Penta helix communication model through community based tourism for tourism village development in Koto Sentajo, Riau, Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 37(3), 851–860. <https://doi.org/10.30892/gtg.37316-718>